

**IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA (GENRE)
DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PERENCANAAN
KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI REMAJA**
Studi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara

T E S I S

OLEH:

**FIFI DARVINA
NPM. 151801089**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

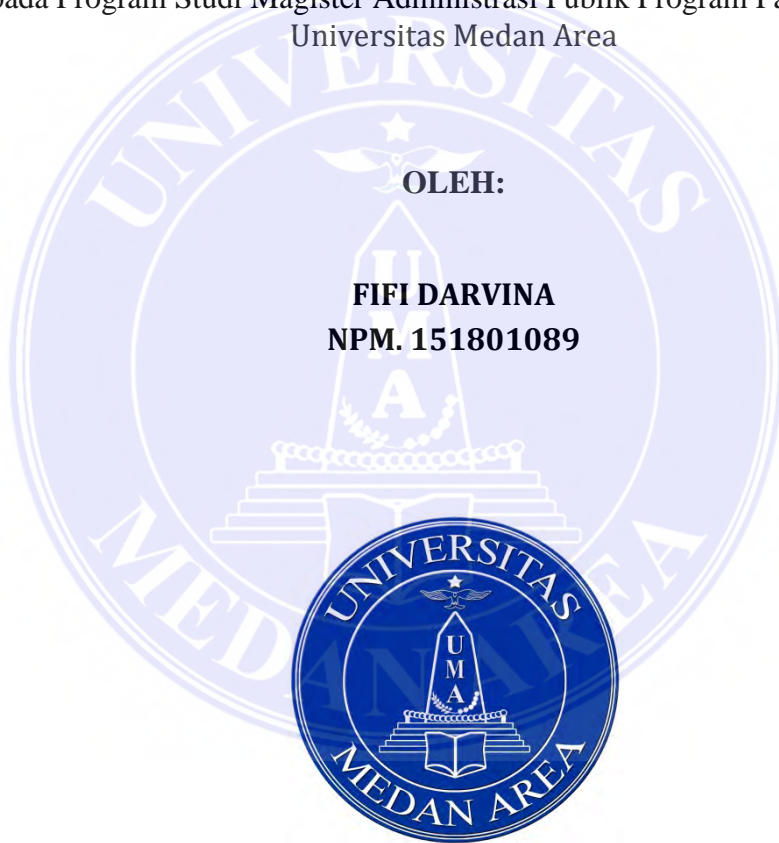
**IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA (GENRE)
DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PERENCANAAN
KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI REMAJA**
Studi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara

T E S I S

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH:

FIFI DARVINA
NPM. 151801089



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe)
Dalam Rangka Penyiapan Dan Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga Bagi Remaja Studi pada Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Utara**

N a m a : Fifi Darvina

N P M : 151801089

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Amir Purba, MA

Pembimbing II



Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 12 Juni 2017

Nama : Fifi Darvina

NPM : 151801089



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Warjio, MA
Sekretaris : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing I : Dr. Amir Purba, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA
Penguji Nama : Dr. Abdul Kadir, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2017

Yang menyatakan,



Fifi Darvina

A B S T R A K

IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA (GENRE) DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PERENCANAAN KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI REMAJA

Studi Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara

N a m a : Fifi Darvina
NPM : 151801089
Program Studi : Master of Public Administration
Pembimbing I : Dr. Amir Purba, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Program Generasi Berencana (GenRe) yang dibuat oleh BKKBN yang diterapkan di sekolah-sekolah melalui pedoman pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling seperti yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Kependudukan Nasional Nomor : 88/PER/F2/2012 tanggal 2 April 2012. Program Generasi Berencana (GenRe) dilaksanakan melalui pendekatan dari dua sisi, yaitu pendekatan kepada remaja itu sendiri dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki anak usia remaja (Bkkbn). Pendekatan kepada remaja melalui wadah pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) di sekolah, sedangkan pendekatan kepada keluarga dilakukan melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan informan penelitiannya diambil secara purposive sampling, yaitu Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Utara, PLKB (petugas lapangan keluarga berencana, kepala sekolah pengurus dan Pembina PIK-remaja di sekolah dan siswa yang tidak menjadi pengurus PIK-R. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program GenRe pada remaja sekolah melalui pusat informasi konseling remaja (PIK-R) yang dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur biroktasi belum berjalan maksimal di Kota Medan. Belum efektifnya implementasi program Program Generasi Berencana (GenRe) ini disebabkan karena kurangnya antara instansi lain seperti dinas pendidikan, BNN, dan dinas kesehatan untuk melakukan komunikasi dan keterbatasannya sumber daya seperti sumber daya manusia dan dana. Dalam implementasi program generasi berencan pada remaja sekolah melalui wadah pusat informasi konseling remaja diperlukannya kordinasi dan komunikasi antara BKKBN Provinsi Sumatera Utara Kota Medan dengan dinas pendidikan dan dinas kesehatan.

Kata Kunci: Implementasi program, Program Generasi Berencana (GenRe), Bkkbn.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GENERASI BERENCANA PROGRAM (GENRE) IN PREPARATION AND PLANNING OF FAMILY LIFE FOR YOUTH

Study at the BKKBN Representative of North Sumatera Province

Name : *Fifi Darvina*
NPM : *151801089*
Study Program : *Master of Public Administration*
Supervisor I : *Dr. Amir Purba, MA*
Supervisor II : *Drs. Kariono, MA*

Generasi Berencana Program (GenRe) made by BKKBN implemented in schools through the guidance of the Information Center and Counseling Center as set forth in the National Population Chief Regulation Number: 88 / PER / F2 / 2012 dated April 2, 2012. Generasi Berencana Program (GenRe) Is implemented through a two-pronged approach, which is the approach to the adolescent itself and to families with teenagers (BkkbN). Approach to adolescents through the development of Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R / M) in schools, while the approach to families is done through the development of Youth Family Development group. This study aims to know and analyze the implementation of Generasi Berencana Program (GenRe) in order to prepare and plan family life for adolescents at the BKKBN Representative of North Sumatera Province. The method used is descriptive qualitative, with the researcher is taken by purposive sampling, the Head of North Sumatera BKKBN, PLKB (family planning field officer, school principal and PIK-R coach in schools and students who do not become PIK-R management. The results of this study indicate that the GenRe Program in school adolescents through adolescent Pusat Informasi Konseling (PIK-R) seen from communication, resource, disposition and bureaucratic structure has not been maximal in Medan City. The ineffectiveness of the implementation of the Generasi Berencana (GenRe) program is due to the lack of other agencies such as education offices, BNN and health offices to communicate and limit resources such as human resources and funds. In the implementation of dating generation program at adolescent school through the container of information center of adolescent counseling need coordination and communication between BKKBN Province of North Sumatera Medan with education office and health department.

Keywords: *Program Implementation, Generasi Berencana Program (GenRe), BkkbN*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **”Implementasi Program Generasi Berencana (GENRE) Dalam Rangka Penyiapan Dan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi RemajaStudi Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Medan Area, Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik dan Khususnya Komisi Pembimbing Tesis Penulis. Tak lupa pula ucapan terima kasih atas doa Ayah dan Ibunda serta seluruh keluarga.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Juni 2017

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Implementasi Program Generasi Berencana (GENRE) Dalam Rangka Penyiapan Dan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Studi Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara**

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Unutuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Warjio, MA.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Amir Purba, MA dan Drs. Kariono, MA.
5. Ayah dan Ibunda serta suami, ananda serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2015.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya, atas ijin dan informasi yang diberikan kepada penulis guna penyelesaian tesis ini.
9. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya prodi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
10. Terimakasih pula kepada Ibuku, suami dan anak-anaku tercinta sertasemua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan Publik	10
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.2 Implementasi Kebijakan	13
2.2.1 Pengertian Implementasi	13
2.2.2 Pengertian Kebijakan	14
2.2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan	15
2.2.4 Model Model Implementasi Kebijakan Publik	16
2.3 Program Generasi Berencana di Indonesia.....	25
2.3.1 Pengertian Program Generasi Berencana.....	27
2.3.2 Kebijakan Program Generasi Berencana	28
2.3.3 Pendekatan Program Generasi Berencana	31
2.4 Kajian Literatur	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	38
3.3 Informan	38
3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4.1 Data Primer	40
3.4.2 Data Sekunder	40
3.4.3 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Defenisi Konsep	41
3.6 Analisis Data	42

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum BkkbN Provinsi Sumatera Utara	45
4.1.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BKKBN 2015-2019	45
4.2	Hasil Penelitian.....	52
4.2.1	Temuan Lapangan Mengenai Implementasi Program Generasi Berencana	52
4.2.2	Pengetahuan Pengurus dan Siswa Tentang Program Generasi Berencana Melalui Wadah Pusat Informasi Konseling Remaja	87
4.3	Pembahasan	93
4.3.1	Implementasi Program GenRe Pada Remaja Sekolah Melalui Wadah Pusat Informasi Konseling di Kota Medan	93
4.3.2	Komunikasi Dalam Implementasi Program Generasi Berencana Melalui Wadah Pusat Informasi Konseling Remaja	96
4.3.3	Sumber Daya Dalam Implementasi Program Generasi Berencana Pada Remaja Sekolah Melalui Wadah Pusat Informasi Konseling (PIK-R)	110
4.3.4	Disposisi atau Sikap Pengelola dan Implementasi Program Generasi Berencana Pada Remaja Sekolah Melalui Wadah Pusat Informasi Konseling Remaja	116
4.3.5	Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program GenRe ..	119
4.3.6	Pengetahuan siswa tentang Program GenRe Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	122

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	125
5.2	Saran - Saran	127

DAFTAR PUSTAKA	129
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	133
--------------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Bagan Keterkaitan Visi BKKBN Dengan Nawa Cita 47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk Indonesia merupakan salah satu penduduk terbesar di dunia. Pada data sensus penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 237,6 juta jiwa, dengan 27,6% dari jumlah penduduknya atau sekitar 64 juta jiwa adalah remaja umur 10-24 tahun (BkkbN,2014). Menurut bidang pelatihan dan pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Ida Bagus Permana, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah usia angkatan kerja (produktif) 15-64 tahun mencapai sekitar 70 % sedang 30% penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030. Dengan jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan masalah kependudukan yang akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional karena kurangnya kesiapan dan keterbatasan pembangunan yang dilakukan pemerintahan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan politik untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pembangunan manusia di bidang kesehatan.

Pembangunan manusia Indonesia di bidang kesehatan dapat terlaksana dengan baik jika Indonesia bisa mewujudkan *target sustainable development goals* (SDG's) seperti mewujudkan kesehatan yang baik dengan menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Untuk mendukung kesehatan remaja yang baik pemerintah memiliki inisiatif membuat program

bersama BkkbN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) yaitu Program Generasi Berencana (GenRe) tahun 2010 untuk mencapai target SDG'S tersebut. Melalui program generasi berencanayang melibatkan orang tua dengan wadah Bina Keluarga Remaja (BKR) dan remaja sekolah denganwadah Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Program generasi berencana diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, berperilaku sehat, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil keluarga sejahtera sehingga hal ini dapat menekan angka kematian ibu dan anak terutama bagi kaum remaja sekolah yang melakukan pernikahan dini (BkkbN, 2012). Khususnya untuk remaja sekolah, melalui program generasi berencana ini diharapkan kaum remaja sekolah bisa mengekspresikan bakatnya melalui kegiatan bermanfaat yang bisa mengeksplor budaya, seni, atau olahraga. Kaum remaja sekolah juga bisa menyampaikan pesan pada remaja lain agar semakin memahami pentingnya kesehatan reproduksi. Berdasarkan antusiasme dan inisiatif generasi muda, pemerintah mempunyai serangkaian kegiatan yang memberdayakan kreativitas dan membawa pesan kesehatan. Bahkan para kaum remaja sekolah bisa berinovasi dengan membuat tarian atau rap GenRe(Generasi Berencana) supaya ke depannya tidak terlibat pada tiga hal yaitu seks bebas, narkoba, dan HIV-AIDS.

Jumlah penduduk remaja di Indonesia sekitar 64 juta jiwa (27,6 % dari penduduk indonesia) diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara khususnya di bidang kesehatan. Dalam hal ini remaja merupakan penerus perjuangan bangsa

dalam pembangunan nasional, khususnya kaum remaja sekolah untuk menjadi generasi berkualitas dan berprestasi. Generasi yang berkualitas akan terbentuk jika remaja dapat terhindar dari masalah remaja seperti seks pra nikah, Narkoba, HIV dan AIDS serta aborsi yang menjadi isu penting saat ini. Remaja sekolah yang pada tahap ini memerlukan perhatian dari keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam pembinaannya. Karena remaja sangat rentan terhadap resiko perilaku seksualitas tidak sehat, narkoba, psikotropika, zat antidiktif, HIV dan AIDS (BkkbN, 2012).

Data BNN (Badan Narkotika Nasional) tahun 2013 yakni sekitar 22% dari 4 juta penduduk Indonesia penyalahguna narkoba, atau sekitar 880 ribu penyalahguna napza adalah pelajar dan remaja atau mahasiswa. Akibat kondisi perilaku remaja yang tidak sehat tersebut akan mempengaruhi kualitas penduduk terutama remaja sekolah untuk ke depannya akan mengganggu 5 (lima) transisi kehidupan remaja yaitu melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat, mempraktekkan hidup sehat (BkkbN, 2012). Perilaku seksual yang tidak sehat dikalangan remaja, khususnya remaja yang belum menikah cenderung meningkat. Berdasarkan data BNN perwakilan Provinsi Sumatera Utara kasus narkoba di Sumatera Utara mulai tahun 2007-2011 tercatat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (MAN) dengan jumlah kasus 9222, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6480 kasus, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3597 kasus dan perguruan tinggi dengan jumlah 551 kasus (BNN, 2012). Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarif mengatakan pada tahun 2010 beberapa wilayah di Indonesia, seks pranikah

dilakukan beberapa remaja di Surabaya tercatat 54 %, Bandung 47 %, dan 52 % di Medan (BkkbN,2010). Apabila masalah perilaku tidak sehat remaja dibiarkan terus menerus akan mempengaruhi kualitas remaja bahkan kualitas bangsa. Pemerintah bersama BkkbN membuat suatu pengembangan program generasi berencana melalui wadah Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang didalamnya terdapat program generasi berencana untuk menangani dan mengurangi resiko kenakalan remaja seperti Narkoba dan pergaulan bebas. Dalam rangka merespon permasalahan remaja tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) mengembangkan program generasi berencana bagi remaja dan keluarga yang memiliki remaja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Hal ini disesuaikan dengan keluarnya Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No.47/Hk.010 B5/2010 Tentang Rencana Strategi BkkbN 2010-2014.

Program Generasi Berencana (GenRe) dilaksanakan melalui pendekatan dari dua sisi, yaitu pendekatan kepada remaja itu sendiri dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki anak usia remaja (BkkbN, 2012). Pendekatan kepada remaja melalui wadah pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) di sekolah, sedangkan pendekatan kepada keluarga dilakukan melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja(BkkbN,2012).Program GenRe yang dilaksanakan oleh BkkbN melalui Bina Keluarga Remaja dapat membantu orangtua dalam menangani, membantu dan memahami permasalahan remaja. Dimana melalui Program GenRe ini orang

tua yang memiliki anak di usia remaja dapat bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja, meliputi Kebijakan Program Generasi Berencana penanaman nilai-nilai moral melalui 8 fungsi keluarga (pendewasaan usia perkawinan, seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS, keterampilan hidup, ketahanan keluarga berwawasan gender, komunikasi efektif orangtua terhadap remaja, peran orangtua dalam pembinaan tumbuh kembang remaja, kebersihan dan kesehatan diri remaja, dan pemenuhan gizi remaja.

Program Generasi Berencana yang dibuat oleh BkkbN yang diterapkan di sekolah-sekolah melalui pedoman pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling seperti yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Kependudukan Nasional Nomor : 88/ PER/F2/2012 tanggal 2 April. guna dari Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) ialah mendukung terlaksananya program generasi berencana secara optimal di semua tingkatan seperti pada remaja sekolah, mahasiswa, dan keluarga. Program ini mengajarkan tentang kesehatan reproduksi dan mempelajari keterampilan hidup (*Life Skills*). Peningkatan *life skills* merupakan pendidikan non formal yang berkaitan dengan keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan emosional, keterampilan spiritual, keterampilan kejuruan, dan keterampilan menghadapi kesulitan. Dengan adanya program generasi berencana yang dicanangkan BkkbN diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan remaja sekolah tentang kesehatan reproduksi dan mengurangi kenakalan remaja sekolah. Karena itu program GenRe telah dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia seperti Lampung Gorontalo dan kota kota lain dan begitu juga halnya di Kota Medan.

Hasil penelitian Ardiansyah yang berjudul Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) Di Kota Bandar Lampung tahun 2015 menyatakan bahwa pengembangan program generasi berencana belum berjalan maksimal di Kota Bandar Lampung. Komunikasi dalam pelaksanaan Program GenRe di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan sosialisasi, namun sosialisasi program tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Komitmen dan tanggung jawab PIK Remaja dalam mengimplementasikan Program GenRe tidak baik. Pelaksanaan program GenRe-Kota Bandar Lampung ada suatu ketidakjujuran yang ditunjukkan oleh pengelola PIK Remaja. Fragmentasi dari pihak PIK Remaja ini pada akhirnya menyebabkan terhambatnya koordinasi di antara pelaksana kebijakan sehingga PIK Remaja dan sekolah tidak dapat menjadi mitra dalam mengimplementasikan GenRe di Kota Bandar Lampung (Ardiansyah, 2015).

Penelitian Puspita Sari Ira yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Medan Deli pada tahun 2015 menyatakan bahwa pelaksanaan program BKR di Kecamatan Medan Deli sudah berjalan namun belum dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari kegiatan penyuluhan tidak rutin dilakukan setiap bulan, sosialisasi yang diberikan belum merata dan tidak adanya penyediaan sarana dan prasarana kegiatan (Puspita, 98: 2015). Penelitian di atas terlihat bahwa program generasi berencana (GenRe) yang dikembangkan melalui wadah Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk membina keluarga berencana masih belum merata pada tahap sosialisasi, sarana dan prasarana. Dalam prosedur pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja pembentukan kelompok sudah baik sesuai dengan administrasi pelaksanaannya,

hanya saja orang tua dan remaja kurang aktif sementara sosialisasi yang diberikan juga sudah berjalan dengan bentuk penyuluhan dan pendekatan kepada orang tua.

Pada tahun 2012 program tersebut bernama program kesehatan reproduksi remaja (KRR) kemudian dikembangkan menjadi program generasi berencana (GenRe). Program genRe di Kota Medan melalui wadah PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) sudah dilaksanakan di beberapa sekolah SMP dan SNA pada awal tahun 2014 dan hanya sekolah-sekolah yang mau menerima dan menerapkan program generasi berencana yang memiliki Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah. Mengingat pentingnya manfaat program tersebut bagi masyarakat Kota Medan khususnya kaum remaja sekolah. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan remaja berkaitan dengan ketidakehatan perilaku seks remaja, kurangnya perhatian pada kesehatan reproduksi, kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai penggunaan narkoba, dan lainnya. Berdasarkan data BNN Provinsi Sumatera utara kasus narkoba di Sumatera Utara mulai tahun 2007-2011 tercatat pada tingkat Sekolah Menengah atas (MAN) dengan jumlah kasus 9222, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6480 kasus, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3597 kasus dan perguruan tinggi dengan jumlah 551 kasus (BNN, 2012). Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarif mengatakan pada tahun 2010 Beberapa wilayah di Indonesia, seks pranikah dilakukan beberapa remaja di Surabaya tercatat 54 %, Bandung 47 %, dan 52 % di Medan.

Dari data diatas dapat dilihat betapa pentingnya pengimplementasian program generasi berencana (GenRe) di Sumatera Utara untuk mencapai

pembangunan manusia yang berkualitas di bidang kesehatan reproduksi, menekan kenakalan remaja seperti seks bebas, hamil pra nikah, HIV dan narkoba khususnya kaum remaja sekolah. Jika pengimplementasian program tersebut berjalan efektif maka tujuan program tersebut akan tercapai sehingga memajukan pembangunan di Sumatera Utara dan sebaliknya jika program tersebut kurang efektif maka tujuan program juga sulit tercapai. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengimplementasian program GenRe di Sumatera Utara dengan judul :

“Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Penyiapan Dan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Pada Perwakilan Bkkbn Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti menarik suatu permasalahan yang lebih mengarah pada fokus penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja pada Perwakilan Bkkbn Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program

Generasi Berencana (GenRe) dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja pada Perwakilan BkkbN Provinsi Sumatera Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah khususnya Perwakilan BkkbN Provinsi Sumatera Utara dalam rangka keberhasilan Program Generasi Berencana (GenRe).
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan bidang administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang implementasi kebijakan publik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian kebijakan Publik

Kebijakan sebuah rencana tindakan yang sengaja dibuat untuk memandu keputusan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan dapat diaplikasikan pada pemerintahan dan organisasi pada sektor swasta. Studi kebijakan biasanya mengacu pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam organisasi, termasuk memilih beragam alternatif dan pemilihan salah satu diantaranya berdasarkan dampak positif dan dampak negatif yang dihasilkan. Kebijakan dapat dipahami sebagai mekanisme politik, manajemen, keuangan, dan administrasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik adalah hubungan antarunit-unit pemerintah dengan lingkungannya. Thomas R. Dye: Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Menurut William Dunn adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan (Dunn, 2003:22). Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda (*Agenda Setting*) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan (Dunn, 2003:27).

Dalam penelitian program generasi berencana pada remaja sekolah di kota Medan penulis ingin melihat proses kebijakan publik yang dilakukan sampai tahap implementasi. Penelitian ini melihat implementasi program generasi berencana dan melihat berbagai kendala yang dihadapi dengan menggunakan model implementasi kebijakan model George C.Edward.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu

dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Mulyadi, 2015:72).

Berdasarkan berbagai pengertian diatas maka penelitian dapat menyimpulkan implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Yang sudah dikaji terlebih dahulu mengenai dampak baik dan buruk dari kebijakan tersebut bagi masyarakat sehingga kebijakan tersebut tidak bertentangan. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat baik secara materil maupun moril.

2.2.2 Pengertian Kebijakan

Secara etimologis istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan latin. Istilah kebijakan ini memiliki arti menangani masalah masalah publik dan pemerintahan. Secara umum, saat ini kebijakan dikenal dengan sebagai keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam sebuah negara.

Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab tahun 2004, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2004:3). Oleh

karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan pelaksanaan sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika di implementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2.2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan menurut George C. Edward adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat”(Winarno,2012:177). Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Definisi diatas menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

2.2.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model yaitu :

1. Model Van Meter dan Van Horn

Teori ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja kebijakan. Mereka menegaskan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur-

prosedur implementasi. Dari pandangan tersebut maka Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan menurut jumlah masing-masing perubahan yang akan terjadi dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Alasan dikemukakannya hal ini adalah bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari para implementor dilapangan relatif tinggi. Hal lain yang dikemukakan mereka bahwa yang menghubungkan kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel bebas itu adalah :

a. Standard dan Sasaran Kebijakan

Standard dan Sasaran Kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standard dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen dan perangkat implementasi.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia seperti dana yang digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan.

c. Komunikasi dan Penguatan Aktivitas

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

d. Karakteristik Agen atau Perangkat Pelaksana

Karakteristik agen atau perangkat pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semua hal tersebut akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni menolak atau mendukung, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan (Mulyadi, 2015:72-73).

2. Model Merilee S. Grindle

Merilee menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Keunikan model Grindle terletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin akan terjadi serta sumber daya yang akan diperlukan selama proses implementasi. Secara konsep dijelaskan bahwa model implementasi kebijakan yang dikemukakan Grindle menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi :

- a. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*).
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*).
- c. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).
- d. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
- e. Para pelaksana program (*program implementation*).
- f. Sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud meliputi :

- a. Kekuasaan (*power*).
- b. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*).
- c. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*).
- d. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

(Mulyadi, 2015:66-67).

3. Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward

Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada model implementasi kebijakan George C. Edward karena permasalahan implementasi program genre di kota medan dapat dianalisis dengan rujukan model implementasi kebijakan menurutnya. Seperti permasalahan sosialisasi dan kurangnya sumberdaya dalam pengimplementasi an program genre tersebut. Untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif, maka dapat dalam penelitian ini menggunakan model implementasi George C. Edward III (1980).

George Edward dalam (Winarno, 2012 : 177) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan. Menurut George Edward III, dalam pendekatan studi implementasi harus dimulai dengan suatu pernyataan abstrak seperti yang dikemukakan sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan

Guna menjawab pertanyaan diatas, George Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi yaitu :

a. Komunikasi/ Comunication

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. (Winarno, 2012: 178).

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut

persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2005:77).

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan, dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Implementasi Program Generasi (GenRe) pada remaja sekolah diperlukan komunikasi supaya tujuan dan sasaran yang ingin disampaikan BkbbN pada siswa sekolah dapat tercapai. Komunikasi yang terarah dan baik sangat diperlukan untuk penyampaian program ini. Implementasi program ini bukan hanya melibatkan BkbbN dan remaja sekolah tetapi pimpinan sekolah dan guru yang harus aktif untuk berjalannya program GenRe di sekolah. Suatu Program yang dibuat pemerintah setelah dikomunikasikan juga memerlukan sumber daya

manusia memiliki kompetensi yang akan memberikan sosialisasi pada masyarakat.

b. Sumber Daya/ Resources

Menurut George C. Edward bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C. Edward sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Winarno, 2012: 184).

Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah program ingin tercapai dengan. Dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan yang dijalankan, kewenangan yang dimiliki, dan kelengkapan yang di miliki sarana dan prasarana menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumberdaya disini bukan hanya manusianya tetapi juga sumber daya

finansial untuk berjalannya suatu program. Sumberdaya finansial akan membantu terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya Program Generasi Berencana (GenRe).

c. Disposisi/ Dispositions

Menurut George C. Edward, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana). Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan (Winarno, 2012: 194).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung dispositions dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Karakteristik Implementator sangat penting dalam program GenRe yang diterapkan di sekolah selain komunikasi dan sumber daya yang diperlukan karakteristik dari fasilitator juga sangat berpengaruh dalam penerapan program.

d. Struktur Birokrasi/ Bureaucratic Structure

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik (Winarno: 2012: 205).

Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur organisasi yang dilayani. Dua karakteristik utama birokrasi adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai respon internal untuk waktu yang terbatas dan sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam pengoperasian kompleks dan tersebar luas organisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai faktor-faktor yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggung jawab

dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua pilihan langkah untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Supaya sekolah sungguh-sungguh dalam penerapan Program Generasi Berencana (GenRe) maka diperlukan fasilitator yang konsisten dalam implementasi program ini. Fasilitator dalam Program Generasi Berencana adalah BkkbN. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti memilih model implementasi kebijakan menurut George C.Edward.

2.3 Program Generasi Berencana Di Indonesia

Negara Indonesia juga memiliki kebijakan yang lain untuk menanggulangi masalah kependudukan yang dimulai pada usia remaja. Kebijakan ini diterapkan melalui BkkbN sebagai wadah untuk mengembangkan kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat pemerintah melalui BkkbN adalah program generasi berencana (Genre) yang diharapkan dapat diterapkan pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Program Genre yang dilakukan oleh BkkbN dibawah naungan Bina Ketahanan Remaja.

Setiap kebijakan dalam implementasi harus direncanakan, dilakukan, diawasi dan dievaluasi. Jika hal diatas ini tidak dilakukan maka suatu kebijakan tidak terlihat penerapannya pada masyarakat. Implementasi program generasi berencanadalam penerapannya harus direncanakan, diawasi dan devaluasi untuk

tahu implementasi program ini di sekolah. Sejak pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) telah disepakati untuk dikembangkan menjadi program Generasi Berencana dalam rangka (Bkkbn, 2012).

Program Generasi Berencana disosialisasikan ke berbagai sekolah dan perguruan tinggi sebagai respon atas Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pasal 48 ayat 1 (b) Undang-Undang itu mengatakan “Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga“. Program Generasi Berencana (Genre) ini dipandang cocok dengan kondisi saat ini, yaitu permasalahan seputar masalah-masalah remaja seperti seksualitas, HIV AIDS, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan rata-rata usia kawin pertama perempuan yang relatif masih rendah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah remaja diantaranya melalui, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) akan sangat berarti untuk menjawab permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Selain itu, juga sebagai sarana remaja untuk berkonsultasi mengembangkan kemauan dan kemampuan positifnya. Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja

guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta perencanaan kehidupan berkeluarga.

2.3.1 Pengertian Program Generasi Berencana

Program GenRe adalah suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. GenRe adalah remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai remaja/mahasiswa, untuk menyiapkan dan perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga. Remaja atau mahasiswa Genre yang mampu melangsungkan jenjang-jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus Kesehatan Reproduksi (*BkkbN, 2012*).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) bagi remaja dan keluarga yang memiliki remaja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Hal ini disesuaikan dengan keluarnya Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No.47/Hk.010 B5/2010 Tentang Rencana Strategi BkkbN 2010-2014.

Program GenRe yang dibuat oleh BkkbN diterapkan di sekolah-sekolah melalui Pedoman pengelolaan Pusat informasi dan konseling yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Kependudukan Nasional Nomor : 88/ PER/F2/2012 tanggal 2 april 2012. Guna dari Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) ialah mendukung terlaksananya Program Generasi Berencana (GenRe) secara optimal di semua tingkatan seperti pada remaja sekolah, mahasiswa, dan keluarga.

2.3.2 Kebijakan Program Generasi Berencana

Kebijakan Program GenRe Dalam pelaksanaan Program GenRe, maka diperlukan beberapa kebijakan antara lain :

1. Peningkatan jejaring kemitraan dalam Program GenRe.
2. Peningkatan SDM pengelola dalam melakukan advokasi, sosialisasi, promosi dan desiminasi Program GenRe pada mitra kerja dan stakeholder.
3. Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa (Centre of Excellence) untuk dapat berperan:Sebagai pusat pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa, Sebagai pusat rujukan remaja/mahasiswa,Sebagai percontohan/model
4. Pengembangan Kelompok BKR yang dimulai dari kelompok dengan stratifikasi Dasar, Berkembang, dan Paripurna Adapun strategi Program GenRe adalah :
5. Memberdayakan SDM pengelola dan pelayanan program Gen Re melalui orientasi, workshop dan pelatihan, serta magang.

- a) Membentuk dan mengembangkan PIK Remaja/Mahasiswa dan BKR

- b) Mengembangkan materi program GenRe (4 substansi)
- c) Meningkatkan kemitraan program GenRe dengan stakeholder dan mitra kerja terkait
- d) Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang

Tujuan Program GenRe

Adapun tujuan dari program GenRe adalah :

1. Tujuan Umum

Memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak (healthy and ethical life behaviors) untuk mencapai ketahanan remaja (adolescent resilience) sebagai dasar mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

2. Tujuan Khusus

- a. Remaja memahami dan mempraktikkan pola hidup sehat dan berakhlak
- b. Remaja memahami dan mempraktikkan pola hidup yang berketahanan
- c. Remaja memahami dan mempersiapkan diri menjadi Generasi Berencana Indonesia

Pengembangan Pembelajaran Dalam Program Generasi Berencana

Adapun pembelajaran dalam program generasi berencana adalah :

- 1. Pendewasaan usia pernikahan
- 2. Keluarga bertanggung jawab
- 3. Triad KRR : (a) napza
(b) hiv/aids

(c) seks pra-nikah

4. Gender

5. Life skills

Sasaran Program Generasi Berencana

Setiap Program pemerintah memiliki sasaran supaya suatu program tersebut mencapai yang direncanakan. Adapun sasaran program GenRe adalah :

- a. Remaja (10-24 tahun) dan belum menikah
- b. Mahasiswa/mahasiswi belum menikah
- c. Keluarga
- d. Masyarakat peduli remaja.

Suatu program yang dibuat pemerintah untuk masyarakat harus diketahui supaya masyarakat mengerti tentang program yang akan diterapkan. Misalnya BKKBN yang memberikan informasi program untuk masyarakat maka harus mensosialisasikannya terlebih dahulu. Salah satu contoh program yang diterapkan BKKBN untuk remaja sekolah adalah Generasi Berencana (GenRe). Dalam sosialisasi BKKBN kepada remaja tentang Generasi Berencana, tidak hanya penyuluhan tentang kesehatan reproduksi tetapi diperlukan diskusi langsung dan memberikan keterampilan kepada remaja.

Sasaran Program Generasi Berencana yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi adalah untuk mengubah perilaku (*behaviour change*). Perubahan perilaku kesehatan sebagai tujuan dari promosi atau pendidikan kesehatan, sekurang-kurangnya mempunyai 3 dimensi, yaitu mengubah perilaku negatif (tidak sehat) menjadi perilaku positif (sesuai dengan nilai – nilai kesehatan),

mengembangkan perilaku positif (pembentukan atau pengembangan perilaku sehat), memelihara perilaku yang sudah positif atau perilaku yang sudah sesuai dengan norma/nilai kesehatan (perilaku sehat dengan mempertahankan perilaku sehat yang sudah ada).

2.3.3 Pendekatan Program Generasi Berencana

Program Generasi Berencana diarahkan untuk dapat mewujudkan remaja yang berperilaku sehat, bertanggungjawab, dan dilaksanakan melalui dua pendekatan sebagai wadah implementasi Program Generasi Berencana, yaitu :

a. Pusat Informasi Konseling Remaja

Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK R/M) suatu wadah dalam program GenRe yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah remaja diantaranya melalui, PIK-R akan sangat berarti untuk menjawab permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Selain itu, juga sebagai sarana remaja untuk berkonsultasi mengembangkan kemauan dan kemampuan positifnya. Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi.

Pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi tidak sesuai dengan realitas perilaku seksual dan resiko seksual yang dihadapi remaja karena

pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang sudah diberikan pada jenjang MAN lebih menitikberatkan pada aspek biologis semata, masih adanya anggapan bahwa seksualitas merupakan hal yang tabu untuk diberikan di sekolah, pendidikan cenderung menekankan pada bahaya dan resiko seks pranikah dari sudut pandang moral dan agama, pendidikan belum memandang pentingnya aspek relasi gender dan hak remaja dalam kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Konstruksi seksualitas remaja dan wacana mengenai pendidikan seksualitas berperan terhadap isi dan metode pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi bagi remaja.

Pendidikan tentang perilaku sehat remaja terutama kesehatan reproduksi yang diajarkan pada remaja sekolah masih menitikberatkan aspek biologis, moral dan agama saja yang kurang menarik perhatian remaja sekolah. Pendidikan tentang perilaku sehat dan kesehatan reproduksi masih terbatas dalam memberikan pengetahuan kepada remaja karena menganggap hal tersebut tabu untuk dibicarakan. Berdasarkan hasil penelitian Diana Teresa Pakasi dan Reni Kartikawati pada tahun 2013 dalam tulisannya “Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di MAN” Dalam penelitian dilakukan di delapan kota yaitu DKI Jakarta, Lampung, Pontianak, Bandung, Semarang, D.I Yogyakarta (Kulon Progo), Jombang, dan Banyuwangi mengatakan PIK-R di delapan kota penelitian ini ternyata masih terbatas dalam menjangkau remaja di sekolah. Meskipun PIK-R telah berprestasi di tingkat nasional untuk memberikan pengetahuan dan konseling pada remaja, kegiatan PIKR lebih banyak dilakukan di komunitas atau organisasi agama atau pemuda.

Keterbatasan lainnya, program PIK-R yang dilakukan di sekolah sebagian besar hanya memberikan pengetahuan saat masa orientasi siswa (MOS), dan hampir tidak ada kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi lanjutan setelah MOS. (Teresa, 82 :2013)

Untuk itu Program Generasi Berencana yang ada sebelumnya masih menggunakan pendekatan tahap awal seperti Pusat Informasi Konseling. Pada saat ini Tujuan Program Generasi Berencana (GenRe) diharapkan tidak hanya bersifat sementara tetapi diharapkan bisa berkesinambungan. Program generasi berencana yang sebelumnya hanya di berikan pada masa orientasi siswa (Mos). Namun saat ini Program Generasi Berencana (GenRe) diharapkan bisa tetap berjalan sepanjang siswa tersebut berada disekolah.

b. Bina Keluarga Remaja

Adalah Suatu Kelompok / wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10 – 24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja dalam rangka memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi PUS anggota kelompok.

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya sumber daya manusia potensial melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua dalam keluarga. Selain itu, dengan adanya program BKR ini diharapkan dapat mengatasi meningkatnya kecenderungan perilaku seks bebas di kalangan remaja.

Program ini dikembangkan oleh Petugas Lapangan KB dan dibantu Stakeholder yang ada di setiap Kelurahan. Sasaran program ini ditujukan bagi remaja dan keluarga yang memiliki remaja sebagai wadah dan sumber informasi bagi orang tua untuk memperoleh pengetahuan tentang pembinaan remaja agar terwujudnya remaja yang berakhlak mulia dan terciptanya keluarga sejahtera.

Tujuan dan sasaran kebijakan program yang buat BkbbN masih perlu direncanakan dengan baik. Sebelum program generasi berencana dengan pendekatan melalui keluarga juga sudah pernah diterapkan hasilnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Keadaan ini terlihat dari hasil penelitian Ira Puspita Sari dalam tulisannya efektivitas pelaksanaan program bina keluarga Remaja (BKR) pada badan pemberdayaan perempuan dan Keluarga berencana di kecamatan Medan Deli. Ira Puspita sari (2015) mengatakan Pelaksanaan program BKR di Kecamatan Medan Deli sudah berjalan namun belum dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari kegiatan penyuluhan tidak rutin dilakukan setiap bulan, sosialisasi yang diberikan belum merata dan tidak adanya penyediaan sarana dan prasarana kegiatan (Puspita, 2015; 98).

Program yang dibuat BkbbN sudah baik dalam perencanaannya namun dalam penerapan dari tujuan dan sasaran dari setiap program BkbbN khususnya Generasi berencana yang melibatkan langsung BkbbN sebagai fasilitator. Supaya Program Generasi Berencana yang diterapkan BkbbN seseuai dengan tujuan tidak lagi terjadi seperti Program Bina Ketahanan Remaja yang masih kurang dalam sosialisasi, sarana dan prasarananya. Pada program Bina keluarga Remaja (BKR) keluarga merupakan salah satu kunci berjalannya program sedangkan pada

program generasi berencana (GenRe) melalui kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja di sekolah diharapkan kerjasama pihak sekolah, guru dan siswa serta pihak BkbbN sebagai fasilitator.

2.4 Kajian Literatur

Ilyas (2011) berjudul *Impelementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi* Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bentuk implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja melalui program kegiatan PIK KRR SMAN 5 Makassar adalah kegiatan komunikasi dalam bentuk promosi dan sosialisasi telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat sebagian siswa SMAN 5 Makassar belum mendapatkan pelayanan dengan baik, karena keterbatasan sarana dan prasarana (Ilyas, 2011:204).

Berdasarkan hasil penelitian Diana Teresa Pakasi dan Reni Kartikawati pada tahun 2013 dalam tulisannya “Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di MAN” Dalam penelitian dilakukan di delapan kota yaitu DKI Jakarta, Lampung, Pontianak, Bandung, Semarang, D.I Yogyakarta (Kulon Progo), Jombang, dan Banyuwangi mengatakan PIK-R di delapan kota penelitian ini ternyata masih terbatas dalam menjangkau remaja di sekolah. Meskipun PIK-R telah berprestasi di stingkat nasional untuk memberikan pengetahuan dan konseling pada remaja, kegiatan PIKR lebih banyak dilakukan di komunitas atau organisasi agama atau pemuda. Keterbatasan lainnya, program PIK-R yang dilakukan di sekolah sebagian besar hanya memberikan pengetahuan saat masa orientasi siswa (MOS), dan hampir

tidak ada kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi lanjutan setelah MOS.
(Teresa, 82 :2013)

Puspita Sari dalam tulisannya efektivitas pelaksanaan program bina keluarga Remaja (BKR) pada badan pemberdayaan perempuan dan Keluarga berencana di kecamatan Medan Deli. Ira Puspita sari (2015) mengatakan Pelaksanaan program BKR di Kecamatan Medan Deli sudah berjalan namun belum dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari kegiatan penyuluhan tidak rutin dilakukan setiap bulan, sosialisasi yang diberikan belum merata dan tidak adanya penyediaan sarana dan prasarana kegiatan (Puspita, 2015; 98).

Hasil penelitian Ardiansyah yang berjudul Implementasi Program Generasi Berencana (Genre) Di Kota Bandar Lampung tahun 2015 menyatakan bahwa pengembangan Program Generasi berencana belum berjalan maksimal di Kota Bandar Lampung. Komunikasi dalam pelaksanaan Program GenRe di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan sosialisasi, namun sosialisasi program tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Komitmen dan tanggung jawab PIK Remaja dalam mengimplementasikan Program GenRe tidak baik. Pelaksanaan program GenRe-Kota Bandar Lampung ada suatu ketidakjujuran yang ditunjukkan oleh pengelola PIK Remaja. Fragmentasi dari pihak PIK Remaja ini pada akhirnya menyebabkan terhambatnya koordinasi di antara pelaksana kebijakan sehingga PIK Remaja dan sekolah tidak dapat menjadi mitra dalam mengimplementasikan GenRe di Kota Bandar Lampung (Ardiansyah, 2015).

Program Generasi Berencana pada suatu daerah tertentu sudah menjangkau pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan hasil

penelitian Sasaran Desak made citrawathi penerapan program generasi berencana juga dilakukan di Bali yang membuat cara tersendiri di dalam meningkatkan kesehatan reproduksi remaja sekolah. Pengembangkan Modul Kesehatan Reproduksi Remaja Berbasis Masalah (KRRBM) untuk melatih dan meningkatkan keterampilan hidup (*life skills*) dalam bidang kesehatan reproduksi dan meningkatkan sikap reproduksi sehat siswa pada SMP. Cara sekolah tersebut meningkatkan pengetahuan adalah dengan cara memasukkan informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) diberikan pada kegiatan ekstrakurikuler Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba, serta melalui ceramah dan poster. Strategi pembelajaran yang digunakan belum melatih keterampilan hidup terkait KRR dan belum membelajarkan sikap reproduksi sehat. Kendala yang dihadapi sekolah SMP ini dalam peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) adalah menentukan strategi pembelajaran yang sesuai untuk melatih keterampilan hidup dan pembelajaran sikap, buku sumber, waktu, dan biaya (Citrawathi dkk , 67: 2014). Setiap program yang akan diterapkan sangat diperlukan perencanaan yang baik untuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasaran ataupun tujuan dari program. Seperti sekolah SMP di Bali ini yang menginginkan adanya modul pembelajaran untuk para siswa untuk teraranya suatu kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti hanya melihat sasaran program GenRE pada remaja ditingkat MAN karena berdasarkan data usia remaja khususnya MAN lebih rentan terhadap masalah seks bebas dan penyalahgunaan narkoba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan yaitu Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan menguji hipotesis tertentu tetapi menggambarkan sesuatu variable, gejala dan keadaan (Bungin, 2009 :99- 100). Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena dengan cara mendeskriptifkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi program Generasi Berencana secara maksimal.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini pada Kantor Perwakilan Bkkbn Provinsi Sumatera Utara Jalan Sutomo Ujung Medan dan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan Jalan William Iskandar Medan. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu 2(dua) bulan, yaitu Maret s/d April 2017.

3.3 Informan

Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu mem berikan informasi dan data (Sugiyono, 2007:62). Informan

adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian yang aktual dalam menjelaskan tentang masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini ialah

- a. Informan Kunci, adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti dan mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yaitu Kepala BkbbN Provinsi Sumatera Utara. Informasi yang diperoleh dari informan kunci adalah siapa saja yang terlibat pengimplementasiannya berhubungan dengan sumberdaya manusia yang terlibat dan sumber dana untuk menjalankan program, penjelasan tentang sosialisasi, tentang kelengkapan sarana dan prasarana,
- b. Informan utama mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu PLKB (petugas lapangan keluarga berencana, kepala sekolah pengurus dan Pembina PIK-remaja di sekolah. Informasi yang diperoleh dari informan utama adalah tentang untuk melihat sikap dan antusias kepala dan pengurus dalam pengimplementasian program genre disekolah.
- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yaitu siswa yang tidak menjadi pengurus PIK-R

3.4 Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan dengan jenis data yang di perlukan untuk mendapatkan informasi. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu Seluruh data yang diambil/diperoleh langsung dari informan dan sumber data lapangan. Pengumpulan data dengan langsung terjun ke lokasi penelitian yang dapat digunakan melalui observasi dan wawancara.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, majalah dan internet yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan :

1. Wawancara Mendalam

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Metode wawancara mendalam sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada umumnya (Bungin, 2009:108).Wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dengan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian Dalam penelitian ini yang

diwawancarai adalah Petugas BkkbN khususnya petugas Bina ketahan remaja, Konselor Pembina PIK-Remaja di sekolah, Pengurus PIK-Remaja di sekolah, Guru, Remaja Sekolah.

2. Observasi atau pengamatan langsung

Yaitu data yang didapat melalui pengamatan yang dilakukan terhadap masalah yang diteliti. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja mata serta dibantu dengan panca indera lainnya (Bungin, 2009 :115). Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi pada saat BkkbN melakukan sosialisasi dan pembinaan.

3.5 Defenisi Konsep

Definisi konseptual adalah pernyataan yang mengartikan atau memberi makna suatu konsep istilah tertentu. Definisi konseptual merupakan penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dan konsep atau istilah tersebut bersifat konstitutif (merupakan definisi yang tersepakati oleh banyak pihak dan telah dibakukan setidaknya dikamus bahasa) formal dan mempunyai pengertian yang abstrak (Hidayat, 2009). Defenisi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Untuk melihat implementasi Program Generasi Berencana (Genre) menggunakan teori George C.Edward III, berdasarkan :

- 1) komunikasi,
 - 2) sumber sumber,
 - 3) disposisi/sikap dan
 - 4) struktur birokrasi.
- b. Program Generasi Berencana (Genre) adalah suatu pelaksanaan program yang dilihat dari komunikasi, sumber-sumber, disposisi/sikap, struktur birokrasi yang tujuannya memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko kesehatan reproduksi remaja (Triad KRR), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Yang pelaksanaannya program generasi berencana melalui wadah pusat informasi konseling remaja.
- c. Pengertian Remaja menurut BKKBN adalah umur 10-24 Tahun (BkkbN)
- d. Pengertian Remaja menurut WHO, yang disebut remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun.
- e. Remaja menurut dinas Kesehatan RI batas usia remaja adalah antara 10 sampai 19 tahun dan belum kawin

3.6 Analisis Data

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang

diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas (Silalahi, 2009-284)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman dari Miles dan Huberman dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

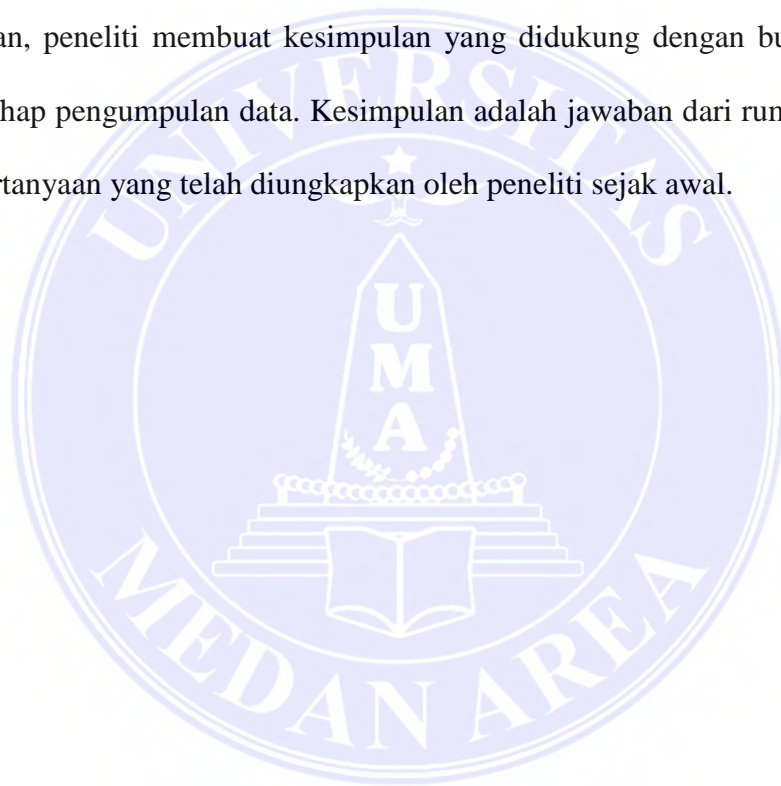
2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk Catatan Wawancara, Catatan Lapangan dan Catatan Dokumentasi. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman

wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. 2015. *Implementasi Program Generasi Berencana (Genre) Di Kota Bandar Lampung* : Universitas Lampung.
- BkkbN. 2012. *Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja*. Jakarta : BkkbN.
- BkkbN. 2011. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan – BkkbN: Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011.
- BNN. 2012. *Data Tingkat Pengguna Narkoba Tahun 2007-2011 Di Provinsi Sumatera Utara*.
- Bogdan & Taylor. 1993. *Metode Kualitatif: Dasar Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional
- Bungin. Burhan, 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Citrawathi Desak Made dkk. 2014. *Pentingnya Modul Kesehatan Reproduksi Remaja Berbasis Masalah (KRRBM) Untuk Melatih Dan Meningkatkan Keterampilan Hidup (Life Skills) Dan Sikap Reproduksi Sehat Siswa SMP*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. ISSN: 2303-2898 Vol. 3, No. 2, Oktober 2014.
- Dunn N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ilyas. 2011. *Impelementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi*. AL-FIKR Volume 15 Nomor1 Tahun 2011 :Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

- IMANyo Andi Herdardi. 2014. *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2014 Kebijakan dan Strategi Program generasi Berencana (GenRe)*.
Direktur Bina Ketahanan Remaja. www.BkbbN.go.id
- Ginting. Paham, 2005. *Tekhnik Penelitian Sosial*. Medan : USU Press.
- Hakim (2013) *Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Studi Pada BKR Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu*.
Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB :
Bengkulu.
- Kurniawan Tri Prapto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Praktek Kesehatan Reproduksi Remaja Di MAN Negeri 1 Purbalingga Kabupaten Purbalingga*: Magister Promosi Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008 (Tesis).
- Momon Sudarma. 2008. *Sosiologi Kesehatan*. Jakarta: Salemba medika.
- Nofrijal Generasi. 2011. *Berencana G-E-N-R-E*. BkbbN Provinsi Gorontalo04
Februari 2011
- Pakasi Diana Teresa & Reni Kartikawati. 2013. *Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di MAN*.
Makara Seri Kesehatan, 2013, 17(2)79-87DOI: 10.7454/msk.v17i2.xxxx.
Depok: Pusat Kajian Gender dan Seksualitas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Putro Gurendro. 2010. *Alternatif pengembangan model kesehatan Reproduksi remaja tahun 2009*. Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol. No 1, Desember

- 2010 : 23 -31. Surabaya: (Pusat Penelitiandan Pengembangan Sistem Kebijakan Kesehatan, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan
- Ritzki Ajeng Pitakasari. 2010. *BkkbN Catat 51 % Remaja Jabodetabek Tidak Perawan*. Republika co.idSenin, 29 November 2010.
- Sari Ira Puspita. 2015.*Efektivitas Pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Di Kecamatan Medan Deli*. Medan: ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Singarimbun. 2008.*Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Solita Sarwono.1990: *sosiologi kesehatan*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Sabatini Barbara Cendi. 2011. *Hubungan Antara Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Dan Persepsi Tentang Peran Keluarga Dengan Prilaku Seksual Pada Remaja Di Surakarta*. Surakarta : Program Pasca Sarjana Sebelas Maret.
- Saragih Rahmat Sah. 2014. *Membangun paradigma optimalisasi kompetensi Mahasiswa melalui pendidikan kesehatan reproduksi Dan seksual*. Esai Kritisoliimpiade Ilmiah Mahasiswa Universitas Indonesia : Jakarta.
- Setiawati Devi. 2010. *Persepsi Remaja Mengenai Pendidikan Seks*. Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
- Tangkilisan Hessel Nosi S.2003. *Impelementasi Kebijakan Publik*.Yogyakarta:Lukman offset & Yayasan Administrasi Publik indonesia.

Winarno Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.



LAMPIRAN 1 : PEDOMAN WAWANCARA

A. PETUGAS BkkbN

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

1. Sejak kapan program ini ada di buat ?
2. Kapan program ini mulai di sosialisasikan di kota medan ?
3. Apa wadah penyalur sosialisasi program generasi berencana ?
4. Apa peran bapak/ibu dalam program ini dan sudah berapa lama ikut berperan ?
5. Bagaimana cara mensosialisasikan program ini, misal melalui surat,seminar,radio,koran tvlokal ?
6. Apakah bapak pernah turun langsung melakukan sosialisasi ?
7. Apakah semua sekolah ikut melaksanakan program ini ?
8. Sekolah mana saja yang ikut program genre ?
9. Mengapa program ini ditujukan ke sekolah sekolah ?
10. Bagaimana pembagian kerja dalam pengimplementasian program ini ?
11. Apakah sumber daya manusia/petugas untuk pengimplementasian program ini sudah cukup ?
12. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarananya ?
13. Apakah ada kendala dalam pendanaan ?
14. Sebagai atasan/bawahan, apakah bapak /ibu merasa senang menjalankan program ini?

15. Sebelum menjadi petugas berapa kali bapak/ibu mendapatkan penataran tentang program ini ?
16. Berapa kali mengadakan sosialisasi ke satu sekolah ?
17. Menurut bapak/ibu ada atau tidak prosedur yang perlu diperbaiki dalam program ini ?
Dan kedepannya sebaiknya seperti apa ?
18. Bagaimana struktur kepengurusan program generasi berencana /siapa saja pengelola dari atas sampai ke bawah ?
19. Bagaimana jalur turunya program genre ?
20. Data sekolah/kecamatan yang sudah menerima program generasi berencana ?
21. Siapa saja yang datang ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan program generasi berencana?
22. Bagaimana Cara mempromosikan/ mensosialisasikan program generasi berencana ?
23. Apakah ada kegiatan pelatihan, orientasi, magang dan studi banding yang dilakukan dalam pelaksanaan program genre ?
24. Apa saja prasarana yang diberikan pihak Bkkn/BPPKB kepada sekolah?
25. Apakah program generasi berencana ini memiliki jangka waktu ?
26. Apa saja kegiatan yang dilakukan sebagai pengelola PIK-Remaja / seperti apa proses pembentukan PIK-remaja ?
27. Darimana sumberdana untuk pengelolaan program PIK-Remaja ?

28. Ada atau tidak dukungan dana untuk konselor dan ssekolah dalam pengelolaan program genre ?
29. Menurut bapak sekolah mana saja yang sudah memiliki prestasi/sudah baik dalam pengembangan/ penerapan PIK-Remaja ?
30. Apakah ada atau tidak diberikan penghargaan pada sekolah yang sudah baik/berprestasi dalam pengembangan PIK-R ?
31. Apa saja kegiatan yang sudah pernah dilakukan BkbbN/BPPKB di sekolah?
32. Apakah program generasi berencana ini adalah program penggantian nama?
33. Apa saja hambatan dalam menjalankan program ini ?
34. Menurut bapak sebagai pengurus/petugas program genre/pik remaja, apa saja yang diperbaiki perlu dari program ini untuk lebih banyak lagi diterima disekolah ?

B. Siswa sebagai pengurus di Pusat Informasi Konseling Disekolah

Nama :

Kelas :

Usia :

1. Kapan program generasi berencana melalui wadah PIK-Remaja ada disekolah ?
2. Sejak kapan anda mejadi pengurus di PIK-R ?
3. Sebagai apa saudara dalam ke pengurusan PIK-Remaja ?
4. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam program genre yang anda ikuti ?
5. Apakah ada petugas BkkbN/BPP&KB/PLKB yang datang memerikan pengarahan/pembinaan tentang program Genre ?
6. Apakah pengurus ada membuat laporan tentang PIK-Remaja kepada BPP&KB ataupun PLKB?
7. Apakah pernah ada seminar yang diadakan BKKBN/BPP&KB tentang PIK-Remaja ?
8. Apakah sekolah anda pernah mengikuti perlombaan tentang PIK-Remaja ataupun Genre ?
9. Selain pembinaan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja apa saja Pembinaan yang dilakukan BPP&KB/ PLKB ?
10. Bagaimana menurut anda sikap petugas BkkbN/BPP&KB dalam menyampaikan program generasi berencana melalui PIK-R ?
11. Selain tentang genre/PIK-Remaja apakah ada lagi yang diajarkan oleh PLKB, misalnya keterampilan ?

12. Selain kegiatan PIK-Remaja apakah ada kegiatan lomba yang sekolah anda ikuti ataupun dilaksanakan di sekolah ?
13. Apabila belum mengerti,apakah saudara mau mencari informasi lain tentang Genre/ PIK ?
14. Apakah ada fasilitas yang diberikan kepada PIK-Remaja di sekolah anda ?
15. Apakah ada dana yang diberikan langsung kepada pengurus PIK-R ?
16. Apakah anda pernah berbicara kepada orangtua tentang Genre ?
17. Bagaimana tanggapan orangtua anda tentang program ini ?
18. Menurut anda apa yang kendala dalam ke pengurusan PIK Remaja ?
Ataukah ada yang perlu ditambahkan untuk melengkapi PIK-Remaja/
untuk kemajuan program generasi berencana ?
19. Apakah sudah ada teman kalian yang curhat ?

C. SISWA

Nama :

Kelas :

Usia :

1. Kapan program Genre ada disekolah ?
2. Sejak kelas berapa saudara/saudari mengikuti genre ?
3. Apakah anda mengerti tentang PIK-Remaja ?
4. Apakah anda pernah secara pribadi melakukan konsultasi ke ke Pengurus PIK –Remaja ?
5. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam program genre yang anda ikuti ?
6. Apakah ada petugas BkbbN yang datang memerikan pengarahan tentang program genre
7. Bagaimana tanggapan anda tentang program generasi berencana yang ada di sekolah ?
8. Apa saja ilmu/kegiatan yang kamu dapat dari program ini dan apa yang sudah anda terapkan ?
9. Bagaimana cara/petugas BkbbN, konselor ataupun petugas PIK-R sebagai wadah program genre ?
10. Bagaimana menurut anda sikap petugas Pusat Informasi Konseling mensosialisasikan program genre ?
11. Bagaimana cara/sikap teman sebaya anda yang bertugas sebagai pengurus PIK-R ?

12. Menurut anda sebaiknya program Genre melalui wadah PIK-R ini di buat seperti apa ?

D. Kepala Sekolah

Nama :

Usia :

1. Sejak kapan program Generasi Berencana melalui wadah PIK-R ada di sekolah beliau pimpin ?
2. Bagaimana proses masuknya program ini ke sekolah/ bagaimana BKKBN/BPP&KB memberikan informasi tentang program generasi berencana ke sekolah anda ?
3. Apa saja kegiatan program generasi berencana melalui wadah PIK-R di sekolah ?
4. Setiap berapa bulan sekali PLKB melakukan Pembinaan ke sekolah beliau ?
5. Apa sekolah yang beliau pernah mengadakan kegiatan yang berkaitan tentang PIK-Remaja yang di adakan oleh BKKBN/BPP&KB ?
6. Dalam melalukan kegiatan yang diselenggarakan ada tidak fasilitas yang diberikan oleh BKKBN/BPPKB
7. Menurut beliau, apakah ada kendala dalam program generasi berencana melalui wadah PIK-R ?
8. jika ada kendala menurut beliau seharusnya seperti apa ?



Keterangan Gambar 1 : Slogan GenRe yang di cat di dinding sekolah MAN 1Medan

Gambar 2



Gambar 3



Keterangan Gambar 3 : Media GenRe KIT berupa permainan monopoli yang materi membahas tentang GenRe

Gambar 4



Keterangan Gambar 4: Majalah Horas GenRe